

**Pengaruh *Corporate Governance* dan Karakteristik
Perusahaan Terhadap Praktik Pengungkapan Laporan
Tahunan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

Fella Novita Ariyanti

NIM. 12030111120009

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2015

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Fella Novita Ariyanti
Nomor Induk Mahasiswa : 12030111120009
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi
Judul Skripsi : **Pengaruh *Corporate Governance* dan
Karakteristik Perusahaan Terhadap
Praktik Pengungkapan Laporan
Tahunan Perusahaan Manufaktur yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia**
Dosen Pembimbing : Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 25 Maret 2015

Dosen Pembimbing,

(Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt.)

NIP . 197909242008122003

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Fella Novita Ariyanti
Nomor Induk Mahasiswa : 12030111120009
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi
Judul Skripsi : **Pengaruh *Corporate Governance* dan
Karakteristik Perusahaan Terhadap Praktik
Pengungkapan Laporan Tahunan Perusahaan
Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 30 April 2015

Tim Penguji :

1. Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt. (.....)
2. Dr. P. Basuki Hadiprajitno, MBA, MAcc, Akt. (.....)
3. Adityawarman, S.E., M.Acc., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Fella Novita Ariyanti, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Pengaruh *Corporate Governance* dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Praktik Pengungkapan Laporan Tahunan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 25 Maret 2015

Yang membuat pernyataan,

Fella Novita Ariyanti

NIM. 12030111120009

ABSTRACT

This study aims to obtain empirical evidence about the influence of corporate governance and company characteristics on the disclosure practices of firms. Elements of corporate governance that are used to test the disclosure practices of firms consist of the proportion of independent commissioners, audit committee independence, audit committee competence and ownership structure. The firm characteristics factors that used in this study such as firm size, and leverage.

Retrieval of data in this study using purposive sampling method in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in the year 2011-2013. The samples of this study as many as 91 companies, and for the items disclosure take from research of Francis Aboagye-Otchere, et al (2012). The data of this study were tested using multiple regression analysis.

The empirical result of this study show that the proportion of independent commissioners, firm size, and leverage are significant and positive effect to the disclosure practices of firms in Indonesia. While, audit committee independence, audit committee competence and ownership structure has no significant impact on disclosure practices of firms.

Keywords : *Disclosure Practices, Corporate Governance, Firm Characteristics, Manufacturing Companies.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh tata kelola perusahaan dan karakteristik perusahaan terhadap praktik pengungkapan perusahaan. Elemen-elemen tata kelola perusahaan yang digunakan untuk menguji luas pengungkapan perusahaan adalah proporsi komisaris independen, independensi komite audit, kompetensi komite audit dan struktur kepemilikan perusahaan. Faktor-faktor karakteristik perusahaan yang digunakan antara lain ukuran perusahaan dan *leverage*.

Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2013. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 91 perusahaan dan untuk item pengungkapan perusahaan mengambil dari penelitian Francis Aboagye-Otchere, et al (2012). Data penelitian diuji menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil analisis menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen, ukuran perusahaan dan *leverage* berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap praktik pengungkapan perusahaan. Sedangkan independensi komite audit, kompetensi komite audit dan struktur kepemilikan tidak signifikan mempengaruhi praktik pengungkapan perusahaan.

Kata Kunci: Praktik Pengungkapan Perusahaan, *Corporate Governance*,

Karakteristik Perusahaan, Perusahaan Manufaktur.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh bekerja (urusan), dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya engkau berharap.
(Q.S. al -Insyirah 5-8)*

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”
(Q.S. Al Baqarah : 216)*

*Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran (yang kau jalani) yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa pedihnya rasa sakit
(Imam Ali bin Abi Thalib AS)*

*Skripsi ini saya persembahkan untuk:
Bapak dan Ibuku yang tercinta & tersayang
Kakakku tersayang
Ryan Arga Renditya
Sahabat dan teman - teman ku sayang*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PRAKTIK PENGUNGKAPAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa dukungan, bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan penuh ketulusan hati ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis.
2. Bapak Jumari dan Ibu Suyamti (Orang Tua) tercinta, yang senantiasa mendo'akan, memberi kasih sayang, cinta, kesabaran, perhatian, motivasi, semangat, dan dukungan baik secara moril maupun materiil yang tiada hentinya kepada penulis. Penulis selalu berusaha menjadi anak

yang berbakti dan memberikan yang terbaik. Semoga penulis dapat menjadi anak kebanggaan kalian sekarang dan selamanya.

3. Bapak Dr. Suharnomo, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. Mohamad Syafrudin.,M.Si.,Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
5. Ibu Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen pembimbing dan dosen wali yang telah meluangkan waktu, memberikan saran, nasehat, teguran, dukungan dan motivasi yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Para Dosen dan Staff tata usaha yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat dan membantu kelancaran penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
7. Kakakku yang terbaik dan paling aku sayangi Epik Selvia Aristian dan suaminya Soy Fediarno, yang telah memberikan do'a, nasehat, dukungan dan motivasi selama penulis menyelesaikan skripsi dan menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Terimakasih selalu setia antar jemput selama 3 tahun kuliah dan memberi semangat, kesabaran dan kasih sayang tulus dalam mendidik adikmu ini. Dek Fella akan selalu berusaha menjadi adik yang terbaik dan membanggakan untukmu.

8. Ryan Arga Renditya yang selalu menjadi semangatku, senantiasa memberikan do'a, dukungan, motivasi, nasehat dalam menjalani semua tantangan hidup sehingga adek bisa kuat dan semangat menyelesaikan skripsi dan kuliah S1 Akuntansi di Universitas Diponegoro ini. Terimakasih atas kesabaran, bantuan dan ketulusannya dalam membimbing dan menemani perjalanan kuliahku selama ini. Tante Rini, Mbak Mega dan Ponakan tersayang Ghaisan terimakasih banyak atas semangat dan doa yang telah diberikan.
9. Sahabat terbaikku Dwi Wahyu Lestari dan Widya Nur Oktaviani yang tidak pernah lelah memberikan do'a, semangat, dukungan dan motivasi buat Fella. Kalian adalah sahabat terbaik yang selalu menemaniku disaat suka maupun duka. Terimakasih atas kehangatan persahabatan dan kekeluargaan yang kalian berikan.
10. Teman-teman sebimbingan Ika, Uli, dan Weni yang selalu mengingatkan untuk rajin bimbingan dan memberi motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih juga untuk Siwi, Intan Bias, Cita, Zeli, Melani, Intan Wijaya, Intan SPP, Nita, Mustika dan seluruh keluarga besar Akuntansi Undip 2011 atas dukungan dan semangat yang diberikan.
12. Seluruh saudara, teman, pihak-pihak yang sudah membantu dalam penulisan skripsi ini namun tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas doa, semangat dan bantuan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun kiranya dapat menjadi satu sumbangan yang berarti dan penulis harapkan adanya saran dan kritik untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat dan digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 25 Maret 2015

Penulis

Fella Novita Ariyanti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN KELULUSAN SKRIPSI	iii
HALAMAN ORIGINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II TELAAH PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	12
2.1.1 Teori Agensi	12
2.1.2 Praktik Pengungkapan Perusahaan	13
2.1.3 <i>Corporate Governance</i>	16
2.1.4 Karakteristik <i>Corporate Governance</i>	18

2.1.4.1 Dewan Komisaris Independen	18
2.1.4.2 Independensi Komite Audit	19
2.1.4.3 Kompetensi Komite Audit	20
2.1.4.4 Struktur Kepemilikan Perusahaan	20
2.1.5 Karakteristik Perusahaan	22
2.1.5.1 Ukuran Perusahaan	22
2.1.5.2 <i>Leverage</i>	23
2.1.6 Penelitian Terdahulu	23
2.2 Kerangka Pemikiran	31
2.3 Hipotesis	32
2.3.1 Proporsi Dewan Komisaris Independen	32
2.3.2 Independensi Komite Audit	33
2.3.3 Kompetensi Komite Audit	34
2.3.4 Struktur Kepemilikan Perusahaan	35
2.3.5 Ukuran Perusahaan	36
2.3.6 <i>Leverage</i>	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	39
3.1.1 Variabel Dependen	39
3.1.2 Variabel Independen	40
3.1.2.1 Proporsi Dewan Komisaris Independen	40
3.1.2.2 Independensi Komite Audit.....	41
3.1.2.3 Kompetensi Komite Audit.....	41

3.1.2.4 Struktur Kepemilikan Perusahaan	41
3.1.2.5 Ukuran Perusahaan.....	41
3.1.2.6 <i>Leverage</i>	42
3.2 Populasi dan Sampel	42
3.3 Jenis dan Sumber Data	42
3.4 Metode Pengumpulan Data	43
3.5 Metode Analisis	43
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif	44
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	44
3.5.2.1 Uji Normalitas	44
3.5.2.2 Uji Multikolonieritas	45
3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas	45
3.5.2.4 Uji Autokorelasi	46
3.5.3 Regresi Berganda (<i>Multiple Regression</i>)	47
3.5.3.1 Koefisien Determinasi (R^2)	47
3.5.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	47
3.5.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)	48
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	49
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	49
4.2 Analisis Data	50
4.2.1 Statistik Diskriptif.....	50
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	54
4.2.2.1 Uji Normalitas	54

4.2.2.2 Uji Multikolinieritas	55
4.2.2.3 Uji Autokorelasi	56
4.2.2.4 Uji Heterokedastisitas	57
4.2.3 Uji Regresi Berganda	59
4.2.4 Hasil Pengujian Hipotesis	60
4.2.4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	60
4.2.4.2 Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)	61
4.2.4.3 Uji t	62
4.3 Interpretasi Hasil	63
4.3.1 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Praktik Pengungkapan Perusahaan.....	63
4.3.2 Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Praktik Pengungkapan Perusahaan	64
4.3.3 Pengaruh Kompetensi Komite Audit terhadap Praktik Pengungkapan Perusahaan	65
4.3.4 Pengaruh Struktur Kepemilikan Perusahaan terhadap Praktik Pengungkapan Perusahaan	66
4.3.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Praktik Pengungkapan Perusahaan.....	67
4.3.6 Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Praktik Pengungkapan Perusahaan.....	68

BAB V PENUTUP	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Keterbatasan	70
5.3 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	78

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 4.1 Perolehan Sampel Penelitian	49
Tabel 4.2 Statistik Diskriptif Sampel	50
Tabel 4.3 Statistik Diskriptif Variabel Dummy (ACEXPT)	51
Tabel 4.4 Deteksi Multikolinieritas Dengan Nilai VIF	55
Tabel 4.5 Nilai Darbin Watson	56
Tabel 4.6 Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Uji Glejser	58
Tabel 4.7 Hasil Regresi Berganda	59
Tabel 4.8 Hasil Uji ANOVA.....	60
Tabel 4.9 Hasil Uji Determinasi	61
Tabel 4.10 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian	31
Gambar 4.1 P-P Plot Awal	55
Gambar 4.2 P-P Plot Setelah Reduksi Outliers	55
Gambar 4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Uji Grafis	57

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN A DAFTAR PERUSAHAAN SAMPEL	78
LAMPIRAN B ITEM PERTANYAAN PENGUNGKAPAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN	83
LAMPIRAN C HASIL PENGOLAHAN DATA DENGAN SPSS	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Isu *corporate governance* dan praktik pengungkapan menjadi sorotan penting masyarakat dunia semenjak runtuhnya perusahaan raksasa di negara-negara maju dan krisis keuangan Asia. Saat ini persaingan antar perusahaan khususnya manufaktur semakin ketat. Perusahaan berusaha untuk meningkatkan kinerjanya guna memperoleh keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya. Salah satu cara perusahaan dalam meningkatkan kinerjanya adalah dengan mengungkapkan informasi yang lengkap pada laporan tahunan mereka. Laporan tahunan adalah sarana bagi publik untuk memperoleh informasi terkait perusahaan dalam pengambilan keputusan bisnisnya. Laporan tahunan juga merupakan media bagi manajer untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pihak investor, kreditor, dan *stakeholder* lainnya. Pengungkapan informasi pada laporan tahunan perusahaan merupakan suatu mekanisme *checks and balances* untuk mengurangi konflik kepentingan, ketidakseimbangan kekuasaan dan kontrol antara para pemangku kepentingan (masalah agensi) yang ada dalam perusahaan. Salah satu cara manajer mengurangi masalah agensi adalah dengan meningkatkan transparansi dan praktik pengungkapan baik secara wajib maupun sukarela kepada pihak yang berkepentingan terutama melalui penerbitan laporan tahunan perusahaan (Aboagye-Otchere, 2012).

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diterbitkan dan telah mewajibkan perseroan untuk membuat laporan tahunan perusahaan (pasal 66 ayat 1). Laporan tahunan tersebut meliputi laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan perseroan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan, laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau, nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau (pasal 66 ayat 2).

Aturan yang berkaitan dengan pengungkapan juga telah termuat dalam Lampiran Surat 2 Edaran Ketua BAPEPAM No. 02/PM/2002 tanggal 27 Desember 2002 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk melindungi para pemilik modal dari adanya asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi ketika manajer lebih mengetahui informasi internal perusahaan daripada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Perusahaan dapat memberikan pengungkapan melalui laporan tahunan yang telah diatur oleh Bapepam baik melalui pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*), maupun melalui pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) sebagai tambahan pengungkapan minimum yang telah ditetapkan. *Mandatory disclosure* merupakan pengungkapan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku dan *voluntary disclosure* merupakan pengungkapan yang tidak diwajibkan, sehingga perusahaan

bebas memilih jenis informasi yang akan diungkapkan, yang dipandang manajemen relevan dalam membantu pengambilan keputusan (Haryanto dan Yunita, 2005). Manajemen akan mengungkapkan informasi secara sukarela dipengaruhi oleh biaya dan manfaat yang diperoleh. Informasi sukarela akan diberikan apabila manfaat yang diperoleh dari pengungkapan informasi tersebut lebih besar dari biayanya (Elliot dan Jacobson., 1994 dalam Murni, 2004).

Pengungkapan yang lengkap/penuh (*full disclosure*) adalah pengungkapan yang menyajikan semua informasi yang relevan (Hendriksen, 2001). Informasi yang diungkapkan adalah informasi minimum yang diwajibkan ditambah dengan informasi lain yang diungkapkan secara sukarela (Hendriksen, 2001). *Full disclosure* dapat membantu mengurangi terjadinya informasi asimetris.

Praktik pengungkapan perusahaan merupakan sarana untuk menyalurkan akuntabilitas perusahaan kepada para penyedia modal (investor). Manajer yang melakukan praktik pengungkapan penuh akan dipandang oleh investor memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki kebijakan pengungkapan lebih ketat (Aboagye-Otchere, 2012). Pengungkapan penuh perusahaan akan mampu memberikan informasi memadai yang dibutuhkan investor dan *stakeholder* lain untuk menilai perusahaan dan pengambilan keputusan bisnisnya. Pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan pada laporan tahunan beberapa diantaranya adalah pengungkapan investor, keuangan dan tata kelola perusahaan. Pengungkapan investor dapat berguna untuk mengetahui informasi terkait pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki masing-masing pemegang saham, dll. Pengungkapan keuangan dapat digunakan

untuk mengetahui informasi terkait keuangan perusahaan sehingga dapat digunakan sebagai pedoman pengambilan keputusan *financial*. Pengungkapan tata kelola perusahaan berhubungan dengan alat-alat internal yang digunakan untuk menjalankan dan mengendalikan sebuah perusahaan, akuntabilitas dan hubungan di antara para pemegang saham, anggota dewan dan para manajer yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan.

Praktik pengungkapan perusahaan yang luas akan menghasilkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan terhadap pemegang saham dan para pemangku kepentingan yang lain. Transparansi dan praktik pengungkapan adalah komponen penting dan indikator utama dari kualitas *Corporate Governance* (Aksu dan Kosedag, 2006). Penerapan konsep *Good Corporate Governance* diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan dan pengungkapan perusahaan (Daniri, 2009).

Masalah *corporate governance* menjadi menarik perhatian karena terjadinya krisis ekonomi di beberapa negara Asia termasuk Indonesia tahun 1997 dan 1998, yang berkembang menjadi krisis multi dimensi berkepanjangan (Kartika, I., 2009). Penyebab krisis ini adalah ada anggapan bahwa *Corporate Governance* di Indonesia lemah. Tidak dapat dipungkiri saat ini Indonesia mempunyai kredibilitas yang buruk di mata Internasional. Korupsi, kolusi, kejahatan perbankan, terorisme, hingga pelayanan pemerintahan yang tidak cukup meyakinkan untuk mendatangkan investor ke Indonesia.

Sistem tata kelola perusahaan-perusahaan di Indonesia harus diperbaiki supaya menciptakan aktivitas perusahaan yang berjalan dengan baik dan

terkendali. Sistem tata kelola perusahaan di Indonesia menggunakan sistem *two tier*. Struktur pemerintahan korporasi atau disebut dengan *board* pada sistem *two tier* dibagi menjadi dua kelompok. Susunan dewan terdiri dari Dewan Direksi (*Board of Director*) dan Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*). Dewan Direksi sebagai pihak eksekutif bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan, sementara Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi kinerja Dewan Direksi dan kebijakan yang dibuatnya (Ratnasari, 2011).

Salah satu negara yang menganut sistem *one tier* adalah Ghana. Dalam sistem *one-tier board*, peran dewan pengawas dan dewan pelaksana dijadikan dalam satu wadah. Wadah ini disebut sebagai *board of directors* (Ticker 2009). Pada sistem ini, tidak ada perbedaan posisi pada direktur yang duduk dalam komite pengendalian manajemen dan direktur lain (Ghezzi and Malberti, 2008 dalam Linoputri, 2010).

Corporate Governance pada penelitian ini terdiri dari empat kategori yaitu proporsi dewan komisaris independen, independensi komite audit, kompetensi komite audit dan struktur kepemilikan perusahaan. Berbagai penelitian yang terkait dengan pengaruh *corporate governance* terhadap praktik pengungkapan perusahaan menunjukkan keanekaragaman hasil. Penelitian yang dilakukan oleh Nurkhin (2009) dan Indah (2013) menunjukkan pengaruh positif antara proporsi dewan komisaris independen dengan praktik pengungkapan perusahaan. Tingginya proporsi dewan komisaris independen akan mendorong manajemen untuk mengungkapkan informasi secara lebih luas. Ho dan Wong (2001) tidak

menemukan pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap praktik pengungkapan penuh perusahaan.

Pengaruh independensi komite audit terhadap praktik pengungkapan juga mengalami ketidakkonsistenan hasil. Suhardjanto (2010) dalam penelitiannya menunjukkan pengaruh positif antara proporsi komite audit independen terhadap praktik pengungkapan perusahaan. Gisbert dan Navallas (2013) juga menemukan pengaruh positif antara dewan komisaris independen pada komite audit terhadap praktik pengungkapan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Aboagye-Otchere et al., (2012) di Ghana menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh proporsi dewan komisaris pada komite audit terhadap pengungkapan perusahaan.

Hasil yang beragam juga terjadi pada penelitian yang menguji pengaruh antara kompetensi komite audit terhadap praktik pengungkapan perusahaan. Penelitian yang dilakukan Othman et al.,(2014) tidak menemukan pengaruh antara kompetensi komite audit dengan praktik pengungkapan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Aboagye-Otchere et al.,(2012) menemukan pengaruh positif antara kompetensi komite audit terhadap pengungkapan perusahaan.

Hasil yang berbeda juga ditemukan pada penelitian yang menguji pengaruh antara struktur kepemilikan perusahaan dengan praktik pengungkapan perusahaan. Parsa et al., (2007) serta Haniffa dan Cooke (2002) menemukan pengaruh positif antara struktur kepemilikan perusahaan dengan pengungkapan perusahaan. Penelitian Aboagye-Otchere et al.,(2012) tidak menemukan pengaruh antara struktur kepemilikan perusahaan dengan praktik pengungkapan perusahaan.

Penelitian mengenai praktik pengungkapan perusahaan selain dikaitkan dengan karakteristik *corporate governance* namun juga dikaitkan dengan karakteristik perusahaan. Beberapa karakteristik perusahaan yang dapat mempengaruhi praktik pengungkapan, misalnya ukuran perusahaan dan *leverage*. Beberapa hasil penelitian juga menunjukkan ketidakkonsistenan pengaruh antara karakteristik perusahaan dengan praktik pengungkapan.

Pengaruh antara *leverage* dan praktik pengungkapan penuh perusahaan juga menemukan hasil yang tidak konsisten antara penelitian satu dengan yang lain. Kamran Ahmed dan John K. Courtis (1999) menemukan pengaruh positif antara *leverage* dengan praktik pengungkapan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Indah (2013) dan Aboagye-Otchere et al.,(2012) tidak menemukan pengaruh antara *leverage* dengan praktik *disclosure*.

Banyak penelitian telah meneliti pengaruh antara karakteristik *corporate governance* dan karakteristik perusahaan terhadap praktik pengungkapan perusahaan. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Perbedaan hasil penelitian-penelitian terdahulu tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh antara tata kelola perusahaan dan karakteristik perusahaan terhadap praktik pengungkapan perusahaan. Peneliti akan menguji apakah terdapat pengaruh antara karakteristik-karakteristik *corporate governance* yang terdiri dari proporsi dewan komisaris independen, independensi komite audit, kompetensi komite audit dan struktur kepemilikan perusahaan terhadap praktik pengungkapan perusahaan. Penelitian ini juga akan menguji apakah ada pengaruh antara karakteristik perusahaan

dengan pengungkapan perusahaan. Karakteristik perusahaan dalam penelitian ini terdiri dari ukuran perusahaan dan *leverage*. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Francis Aboagye-Otchere, Ibrahim Bedi dan Teddy Ossei Kwakye (2012). Penelitian terdahulu tersebut dilakukan dengan *setting* di Ghana pada perusahaan yang terdaftar di *Ghana Stock Exchange* (GSE) antara tahun 2006-2007. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan mengambil tahun terbaru yaitu antara 2011 sampai dengan 2013. Penelitian ini juga mengambil sampel perusahaan Indonesia, di mana sistem *corporate governance* yang digunakan adalah sistem *two tier*, sedangkan di Ghana menggunakan sistem *one tier*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, secara spesifik permasalahan yang hendak dijawab melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat praktik pengungkapan perusahaan?
2. Apakah Independensi Komite Audit berpengaruh terhadap tingkat praktik pengungkapan perusahaan?
3. Apakah keberadaan ahli akuntansi/keuangan pada Komite Audit berpengaruh terhadap tingkat praktik pengungkapan perusahaan?
4. Apakah struktur kepemilikan perusahaan berpengaruh terhadap tingkat praktik pengungkapan perusahaan?

5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat praktik pengungkapan perusahaan?
6. Apakah *leverage* dari suatu perusahaan berpengaruh terhadap tingkat praktik pengungkapan perusahaan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris dan analisis pengaruh antara:

1. Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap tingkat praktik pengungkapan perusahaan.
2. Independensi Komite Audit terhadap tingkat praktik pengungkapan perusahaan.
3. Keberadaan ahli akuntansi/keuangan pada Komite Audit terhadap tingkat praktik pengungkapan perusahaan.
4. Struktur kepemilikan perusahaan terhadap tingkat praktik pengungkapan perusahaan.
5. Ukuran perusahaan terhadap tingkat praktik pengungkapan perusahaan.
6. *Leverage* dari suatu perusahaan terhadap tingkat praktik pengungkapan perusahaan.

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada:

1. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai akuntansi. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan inspirasi dan gagasan dalam penelitian selanjutnya mengenai

pengaruh *corporate governance* dan karakteristik perusahaan terhadap praktik pengungkapan perusahaan baik secara wajib maupun sukarela.

2. Bagi Perusahaan, penelitian ini dapat memberi masukan bagi perusahaan dalam melaksanakan praktik pengungkapan laporan tahunan yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dalam proses pengambilan keputusan bisnisnya.
3. Bagi Pembaca, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dan masukan dalam memahami pentingnya praktik pengungkapan pada perusahaan, baik pengungkapan wajib (*mandatory*) maupun sukarela (*voluntary*) dari perusahaan yang terdaftar di BEI.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan topik yang diteliti dan menampilkan penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini. Dalam bab ini dijelaskan pula kerangka pemikiran teoritis serta pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian. Hal tersebut meliputi definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, dan

sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, identifikasi variabel, dan metode analisis data.

BAB IV :ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan dan keterbatasan penelitian. Saran juga disertakan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Agensi

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keagenan. Teori ini digunakan untuk membangun pengaruh antara tata kelola perusahaan dan karakteristik perusahaan dengan praktik pengungkapan perusahaan. Teori keagenan membagi perusahaan menjadi dua kelompok individu yaitu prinsipal dan agen. Agen bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan prinsipal. Prinsipal bertanggungjawab untuk memberi imbalan kepada agen atas kinerja yang dilakukannya. Pihak manajemen perusahaan dianalogikan sebagai agen dan pemilik perusahaan adalah prinsipal. Para pemilik disebut evaluator informasi dan agen mereka disebut pengambil keputusan (Hendriksen dan Van Breda, 2001). Evaluator informasi bertanggungjawab untuk memilih sistem informasi yang digunakan perusahaan. Pilihan mereka harus dibuat sedemikian rupa sehingga para pengambil keputusan membuat keputusan terbaik mereka.

Hubungan keagenan antara manajer dan pemegang saham menimbulkan masalah asimetri informasi. Asimetri informasi akan terjadi ketika manajemen lebih tau banyak tentang informasi internal perusahaan daripada pemilik perusahaan. Manajemen tahu bahwa para pemegang saham akan berusaha mengendalikan perilaku mereka melalui monitoring, sehingga manajemen mencoba untuk meyakinkan pemegang saham bahwa mereka bertindak secara

optimal (Watson et al, 2002). Salah satu cara manajer mengurangi *agency cost* adalah dengan meningkatkan transparansi dan praktik pengungkapan baik secara wajib maupun sukarela kepada pihak yang berkepentingan (Aboagye-Otchere et al, 2012). Pengungkapan akan membantu mengurangi konflik agensi dengan menjembatani kesenjangan informasi yang ada antara manajemen dengan pemegang saham.

2.1.2 Praktik Pengungkapan Perusahaan

Laporan keuangan adalah media utama manajemen dalam menyampaikan informasi kepada *stakeholder*. Kualitas informasi keuangan tercermin pada sejauh mana luas pengungkapan laporan yang diterbitkan perusahaan (Haryanto dan Yunita, 2005). Kata *disclosure* (pengungkapan) memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan (Ghozali dan Chariri 2007:377). Pengungkapan laporan tahunan dimaksudkan untuk memberi manfaat pada pihak yang berkepentingan dan membutuhkan informasi perusahaan. Informasi-informasi yang diungkapkan harus benar-benar bermanfaat, apabila tidak bermanfaat maka tujuan dari pengungkapan tersebut tidak akan tercapai.

Pengungkapan (*disclosure*) dibedakan menjadi dua, yaitu *mandatory disclosure* (pengungkapan wajib) dan *voluntary disclosure* (pengungkapan sukarela). Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) adalah praktik pengungkapan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku, sedangkan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) merupakan pengungkapan yang tidak diwajibkan, sehingga perusahaan bebas memilih jenis informasi yang akan

diungkapkan, yang dipandang manajemen relevan dalam membantu pengambilan keputusan.

Hendriksen (2001) mengungkapkan bahwa terdapat tiga konsep yang umum dalam pengungkapan yaitu:

1. Pengungkapan yang cukup (*adequate disclosure*) adalah pengungkapan informasi oleh perusahaan dengan tujuan memenuhi kewajiban dalam menyampaikan informasi. Informasi yang diungkapkan sesuai dengan standar minimum yang diwajibkan, terutama informasi yang menurut lembaga terkait wajib disajikan. Pengungkapan jenis ini banyak dilakukan oleh perusahaan.
2. Pengungkapan yang wajar (*fair disclosure*) adalah pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan dengan menyajikan sejumlah informasi yang menurut perusahaan dapat memuaskan pengguna Laporan Keuangan yang potensial. Informasi minimum yang diwajibkan dan informasi tambahan lainnya untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan yang wajar.
3. Pengungkapan yang lengkap (*full disclosure*) adalah pengungkapan yang menyajikan semua informasi yang relevan. Informasi yang diungkapkan adalah informasi minimum yang diwajibkan ditambah dengan informasi lain yang diungkapkan secara suka rela. *Full disclosure* dapat membantu mengurangi terjadinya informasi asimetris.

Di Indonesia peraturan yang mengatur tentang pengungkapan adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan aturan dari BAPEPAM yang termuat dalam Lampiran Surat Edaran Ketua BAPEPAM No. 02/PM/2002 tanggal 27

Desember 2002 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Perusahaan mempunyai kepentingan untuk memberikan pengungkapan secara memadai karena investor membutuhkan informasi yang memadai untuk dapat menilai perusahaan dalam hal pengambilan keputusan investasi. Faktor biaya dan manfaat merupakan faktor yang mempengaruhi pertimbangan manajemen didalam pengungkapan informasi yang akan dilakukannya (Haryanto dan Yunita, 2005). Manajemen akan mengungkapkan informasi, bila manfaat yang diperoleh dari pengungkapan informasi tersebut lebih besar dari biayanya. Manfaat yang didapat adalah diperolehnya biaya modal yang rendah (Elliot dan Jacobson., 1994 dalam Murni, 2004), dan dipahaminya resiko investasi. Luas pengungkapan antara perusahaan dalam industri satu dengan industri lainnya berbeda-beda. Perbedaan ini dipicu dari kandungan resiko pada masing-masing industri yang berbeda, karena masing-masing industri memiliki karakteristik yang berbeda (Haryanto dan Yunita, 2005).

Penelitian ini membagi pengungkapan menjadi tiga kategori yaitu pengungkapan investor, keuangan dan tata kelola perusahaan. Pengungkapan investor dapat berguna untuk mengetahui informasi terkait pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki masing-masing pemegang saham, besarnya saham yang diterbitkan, dll. Pengungkapan investor ini dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan investasi bagi para pengguna laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan keuangan dapat digunakan untuk mengetahui informasi terkait keuangan perusahaan sehingga dapat digunakan sebagai pedoman pengambilan keputusan *financial*. Pengungkapan keuangan juga dapat memberikan informasi

apakah laporan keuangan perusahaan telah disusun berdasarkan standar akuntansi dengan benar. Pengungkapan tata kelola perusahaan berhubungan dengan alat-alat internal yang digunakan untuk menjalankan dan mengendalikan sebuah perusahaan, akuntabilitas dan hubungan di antara para pemegang saham, anggota dewan dan para manajer yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan.

2.1.3 Corporate Governance

Forum for Corporate Governace in Indonesia (2000: 1) mendefinisikan *corporate governance* sebagai:

"Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan."

Mathiesen (2002) menjelaskan bahwa *corporate governance* merupakan suatu bidang dalam ekonomi yang menginvestigasi bagaimana menjamin efisiensi manajemen korporasi dengan menggunakan mekanisme insentif, seperti kontrak, desain organisasional, dan legislasi. *Corporate governance* merupakan suatu sistem dimana korporasi diatur dan dikontrol (Rasyidah, 2013).

Menurut KNKG (2006) dalam pedoman umum *good corporate governance* Indonesia terdapat 5 (lima) asas *good corporate governance*, yaitu:

1. Transparansi (*Transparency*)

Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya sehingga perusahaan harus dikelola dengan benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan stakeholder. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang harus dilakukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan yang memadai.

4. Independensi (*Independency*)

Dalam melaksanakan asas *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola dengan independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kewajaran dan kesetaraan.

2.1.4 Karakteristik *Corporate Governance*

Corporate governance bukan sekedar peraturan tetapi merupakan pedoman bagaimana cara mengatur perusahaan yang baik dan mencegah terjadinya kecurangan yang dapat merugikan perekonomian secara luas (Rasyidah, 2013). Tata kelola perusahaan yang baik akan mengurangi konflik keagenan yang terjadi dalam suatu perusahaan. *Corporate Governance* terdiri dari beberapa karakteristik, yaitu :

2.1.4.1 Dewan Komisaris Independen

Aspek penting dalam *corporate governance* salah satunya adalah dewan komisaris. Egon Zehnder dalam *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2000) menyatakan bahwa dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang mengawal pelaksanaan strategi, mengawasi manajemen, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan.

Terdapat dewan komisaris independen di dalam keanggotaan dewan komisaris. Berdasarkan keputusan Bapepam No.29/PM/2004 Komisaris Independen didefinisikan sebagai anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham mayoritas serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Dewan komisaris independen dipandang sebagai

mekanisme *check and balance* untuk meningkatkan efektifitas dewan komisaris (Haniffa dan Cooke, 2002).

Kriteria mengenai komisaris independen menurut lampiran keputusan BEI No. Kep - 339/BEJ/07-2001 sebagai berikut :

1. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali perusahaan tercatat yang bersangkutan.
2. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan.
3. Komisaris Independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
4. Komisaris Independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

2.1.4.2 Independensi Komite Audit

Sesuai dengan keputusan ketua BAPEPAM No: kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dewan komisaris.

Berdasarkan peraturan Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Kep-29/PM/2004 tanggal 24 Desember 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya yang berasal dari luar perseroan.

Salah satu faktor yang dianggap dapat berpengaruh terhadap peran komite audit adalah proporsi komisaris independen. Proporsi dewan komisaris yang independen dianggap akan mempunyai pengaruh terhadap efektifitas komite audit karena anggota komite audit dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris (Sitorus, 2012). Adanya dewan komisaris independen dalam komite audit membuat kinerja komite audit semakin independen dan dapat dipercaya.

2.1.4.3 Kompetensi Komite Audit

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen keuangan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan (Yunita, 2010). Kehadiran ahli keuangan dalam komposisi komite audit akan membantu komite audit dalam menganalisis kebijakan akuntansi dan laporan keuangan secara kritis, mengidentifikasi potensi masalah, dan pemecahannya (Aboagye-Otchere et al, 2012).

Kompetensi komite audit di bidang akuntansi dan keuangan dapat meningkatkan kualitas komite audit. Persons (2009) mengatakan bahwa anggota komite audit dengan keahlian keuangan atau akuntansi lebih mungkin untuk mendeteksi salah saji keuangan atau transaksi bisnis karena mereka harus mematuhi kode etik profesional untuk mempertahankan reputasi mereka.

2.1.4.4 Struktur Kepemilikan Perusahaan

Daniri (2005) dan Haron (2009) menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan dapat dibagi menjadi dua mekanisme, mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme pencegahan kesalahan internal terdiri dari komite audit,

komite pemantauan risiko, audit internal, dan pemantauan risiko, yang membantu dewan komisaris (*board*) dalam menciptakan sistem pengendalian. Mekanisme eksternal termasuk auditor eksternal, otoritas regulasi, dan pemegang saham. Pemilik (*shareholder*) memegang peran penting dalam penentuan struktur perusahaan, meliputi: ukuran dan jenis bisnis, arah pengembangan bisnis, jumlah pemilik yang dominan, pertimbangan pajak, strategi perusahaan, kebijakan penggunaan profesional, struktur modal perusahaan, pertimbangan pembiayaan perusahaan, kebijakan investasi, alokasi risiko, dan bentuk pengendalian (Colley Jr dkk, 2003).

Struktur kepemilikan adalah jenis institusi atau perusahaan yang memegang saham dalam suatu perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 2006). *Agency problem* dapat berkurang dengan adanya struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham (Faisal, 2005). Struktur kepemilikan akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan jalannya perusahaan sehingga berpengaruh pula pada kinerja perusahaan.

Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal diatur tentang transparansi dan proses kepemilikan saham 5% atau lebih. Hal ini mencerminkan batasan 5% sudah dianggap signifikan di Bursa Efek Indonesia. Pemegang saham yang memiliki saham lebih dari 5% dari keseluruhan saham perusahaan memiliki dominasi dalam pengambilan keputusan bisnis perusahaan. Semakin sedikit pihak pemegang saham yang mendominasi perusahaan maka kepemilikan perusahaan tersebut semakin terkonsentrasi. Perusahaan dengan struktur kepemilikan yang

terkonsentrasi tidak perlu secara luas memberikan informasi terkait perusahaan sebab pemegang saham utama dapat lebih mudah mengakses informasi tersebut dibandingkan perusahaan dengan struktur kepemilikan yang lebih menyebar (Elzahar and Hussainey, 2012).

2.1.5 Karakteristik Perusahaan

Karakteristik perusahaan dapat menjelaskan variasi luas pengungkapan dalam laporan tahunan, karakteristik perusahaan merupakan prediktor kualitas pengungkapan (Lang and Lundholm, 1993 dalam Rosmasita, 2007). Karakteristik perusahaan merupakan cirri khas atau sifat yang melekat dalam suatu entitas usaha yang dapat dilihat dari beberapa segi, diantaranya jenis usaha atau industri, tingkat likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan (Nurliana Safitri, 2008). Karakteristik perusahaan dalam penelitian ini terdiri dari :

2.1.5.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan memperlihatkan besar atau kecilnya perusahaan tersebut. Perusahaan yang besar kemungkinan akan mengungkapkan informasi secara lebih luas. Ada tiga alternatif proksi yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya ukuran perusahaan, yaitu melalui ukuran aktiva, hasil penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar (Johan, 2006).

Semakin besar perusahaan maka akan semakin menarik perhatian *stakeholder* dan para investor. Perusahaan besar akan semakin berkepentingan dalam melakukan praktik pengungkapan perusahaan yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan publik. Berdasarkan teori keagenan, perusahaan hendaknya mengungkapkan informasi secara lebih luas kepada investor dan *stakeholder* yang

lain untuk mengurangi asimetri informasi. Perusahaan kecil akan merasa terbebani dengan pengungkapan yang luas karena biaya yang mereka keluarkan tidak sebanding dengan manfaat yang mereka peroleh. Perusahaan kecil justru merasa bahwa pengungkapan informasi yang luas bisa membahayakan posisi kompetitif mereka (Aboagye-Otchere et al.,2012). Perusahaan kecil umumnya berada pada situasi persaingan yang ketat dengan perusahaan yang lain (Haryanto dan Yunita, 2005).

2.1.5.2 Leverage

Leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya baik jangka pendek maupun jangka panjang jika suatu perusahaan dilikuidasi (Hadiningsih, 2007). Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio *leverage* yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal yang seperti itu lebih tinggi (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Simanjuntak dan Widiastuti, 2004). Perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi akan termotivasi untuk secara sukarela mengungkapkan informasi yang luas untuk mengakomodir kepentingan kreditur (Aboagye-Otchere et al.,2012). Menurut Schipper (1981) dalam Fitriany (2001), tambahan informasi diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian–penelitian sebelumnya yang di lakukan di berbagai negara telah menguji pengaruh antara *corporate governance* dan karakteristik perusahaan dengan praktik pengungkapan perusahaan. Hasil dari penelitian–penelitian

tersebut menunjukkan beberapa perbedaan antara penelitian satu dengan yang lainnya.

Pada tahun 1999, Kamran Ahmed dan John K. Curtis telah melakukan penelitian mengenai pengaruh antara pengungkapan perusahaan dengan *corporate governance*. Penelitian ini mengklasifikasikan pengungkapan ke dalam tiga tipe yaitu pengungkapan sukarela, pengungkapan wajib dan kombinasi antar keduanya (agregat). Karakteristik *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ukuran perusahaan, status *listing*, *leverage*, profitabilitas, ukuran komite audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara ukuran perusahaan, status *listing* dan *leverage* dengan praktik pengungkapan. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara profitabilitas dan ukuran komite audit dengan praktik pengungkapan perusahaan.

Penelitian juga dilakukan oleh Haryanto dan Yunita (2005). Penelitian ini menguji pengaruh antara pengungkapan sukarela dengan likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan dan profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh signifikan positif antara pengungkapan sukarela dengan likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan dan profitabilitas.

Ahmad Nurkhin (2009) menguji pengaruh antara pengungkapan tanggung jawab perusahaan dengan karakteristik *Corporate Governance* dan profitabilitas. Pada penelitian ini karakteristik *Corporate Governance* terdiri dari kepemilikan institusional dan komposisi dewan komisaris independen. Profitabilitas di proksikan sebagai ROE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi dewan

komisaris dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan.

Penelitian selanjutnya telah dilakukan oleh Suhardjanto, dkk pada tahun 2010. Penelitian ini meneliti tentang peran *corporate governance* dalam praktik *risk disclosure* pada perbankan di Indonesia. Karakteristik *corporate governance* dalam penelitian ini terdiri dari ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, proporsi komisaris wanita, latar belakang pendidikan komisaris utama, latar belakang etnik komisaris utama, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit dan proporsi komite audit independen. Penelitian ini menggunakan 2 variabel kontrol yaitu *leverage* dan *profitability*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi tingkat *risk disclosure* berupa ukuran dewan komisaris (*board size*), jumlah rapat dewan komisaris dan *leverage*. Variabel lainnya yaitu proporsi komisaris independen, latar belakang pendidikan komisaris utama, latar belakang etnis komisaris utama, komposisi komisaris independen, komposisi komite audit independen, jumlah rapat komite audit dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *risk disclosure*.

Penelitian serupa dilakukan oleh Suryono dan Prastiwi (2011). Penelitian ini menguji pengaruh antara praktik pengungkapan *Sustainability Report* dengan profitabilitas, likuiditas, *leverage*, aktivitas, ukuran perusahaan dan *corporate governance* (komite audit, dewan direksi, *Governance Committee*). Hasil penelitian ini menunjukkan profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit, dewan direksi, berpengaruh positif terhadap praktik pengungkapan *Sustainability Report*,

sedangkan likuiditas, *leverage*, aktivitas, *Governance Committee* tidak berpengaruh terhadap *Sustainability Report*.

Aboagye-Otchere et al (2012) telah meneliti pengaruh antara *corporate governance* dan karakteristik perusahaan terhadap praktik pengungkapan perusahaan di Ghana. Praktik pengungkapan dalam penelitian ini dibedakan ke dalam 3 kategori yaitu pengungkapan investor, pengungkapan transparansi dan keuangan, dan pengungkapan *corporate governance*. *Corporate governance* terdiri dari 3 karakteristik yaitu komposisi dewan, komposisi komite audit, dan kompetensi komite audit. Penelitian ini juga meneliti pengaruh karakteristik perusahaan yaitu struktur kepemilikan, ukuran perusahaan dan *leverage* dengan praktik pengungkapan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara praktik pengungkapan terhadap komposisi dewan, independensi komite audit, struktur kepemilikan perusahaan dan *leverage*. Tidak terdapat pengaruh antara pengungkapan dengan kompetensi komite audit dan ukuran perusahaan.

Indah (2013) telah melakukan penelitian mengenai *corporate governance* dan karakteristik perusahaan dalam pengungkapan *sustainability report* di Indonesia. Karakteristik *corporate governance* dalam penelitian ini terdiri dari dewan komisaris, komite audit, dewan direksi, *governance committee*, profitabilitas, likuiditas, *leverage*, aktivitas perusahaan, dan ukuran perusahaan. Hasil penelitian ini adalah variabel dewan direksi, *governance committee*, profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Dewan komisaris, komite audit, likuiditas, *leverage* dan

aktivitas perusahaan tidak memiliki peran dalam pengungkapan *sustainability report*.

Gisbert dan Navallas (2013) meneliti pengaruh antara karakteristik *corporate governance* dengan pengungkapan sukarela. Karakteristik *corporate governance* dalam penelitian ini meliputi proporsi direktur independen pada dewan, ukuran dewan, Dualitas CEO, konsentrasi kepemilikan. Hasil dari penelitian ini adalah ada pengaruh positif antara proporsi direktur independen pada dewan, ukuran dewan, terhadap pengungkapan sukarela. Dualitas CEO dan konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik pengungkapan sukarela.

Othman et al., (2014) melakukan penelitian yang menguji pengaruh antara pengungkapan sukarela dengan karakteristik komite audit. Karakteristik komite audit dalam penelitian ini terdiri dari independensi komite audit, kompetensi komite audit, frekuensi rapat komite audit, ukuran komite audit, tenur komite audit dan beberapa direktur pada komite audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara komite audit, kompetensi komite audit, frekuensi rapat komite audit, ukuran komite audit, dengan pengungkapan sukarela; sedangkan tenur komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela dan beberapa direktur pada komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Peneliti	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
1	1999	Kamran Ahmed dan John K. Courtis	Y= Pengungkapan (Sukarela, wajib dan agregat) X= <i>Corporate Governance</i> (ukuran perusahaan, status listing, <i>leverage</i> , provitabilitas, ukuran komite audit)	Ada pengaruh positif antara ukuran perusahaan, status listing dan <i>leverage</i> dengan praktik pengungkapan. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara profitabilitas dan ukuran komite audit dengan praktik pengungkapan perusahaan.
2	2005	Haryanto dan Yunita	Y = Pengungkapan sukarela X = Likuiditas, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, profitabilitas	Likuiditas, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela
3	2009	Ahmad Nurkhin	Y = Pengungkapan tanggung jawab perusahaan X = <i>Corporate Governance</i> (kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris independen); Profitabilitas (ROE)	Komposisi dewan komisaris dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan.
4	2010	Suhardjant o ,dkk.	Y= praktik <i>risk disclosure</i> X= <i>corporate governance</i> (Ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, proporsi komisaris wanita, latar belakang pendidikan komisaris	Variabel yang mempengaruhi tingkat <i>risk disclosure</i> berupa ukuran dewan komisaris (<i>board size</i>), jumlah rapat dewan komisaris dan <i>leverage</i> . Variabel lainnya yaitu proporsi komisaris

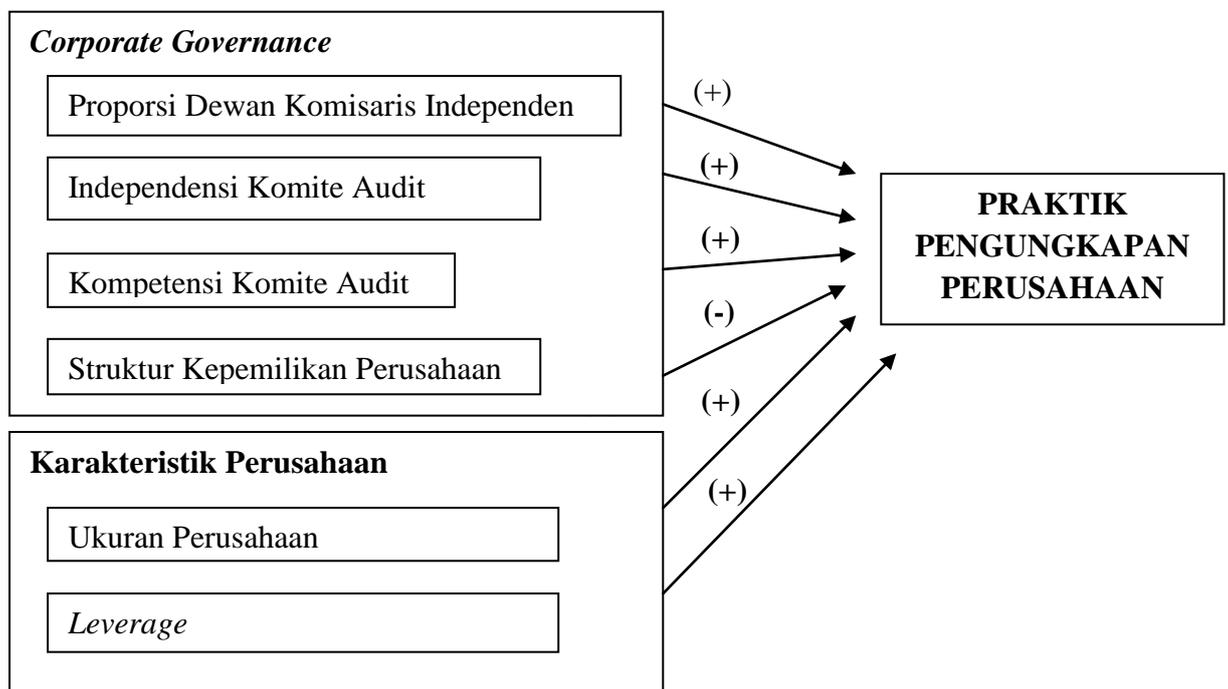
			utama, Latar belakang etnik komisaris utama, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit, proporsi komite audit independen) <i>Kontrol= Leverage dan Profitability</i>	independen, latar belakang pendidikan komisaris utama, latar belakang etnis komisaris utama, komposisi komisaris independen, komposisi komiteaudit independen, jumlah rapat komite audit dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>risk disclosure</i> .
5	2011	Suryono dan Prastiwi	Y = Praktik pengungkapan <i>Sustainability Report</i> X = Profitabilitas, likuiditas, <i>leverage</i> , aktivitas, ukuran perusahaan, <i>corporate governance</i> (komite audit, dewan direksi, <i>Governance Committee</i>)	Profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit, dewan direksi, berpengaruh positif terhadap praktik pengungkapan <i>Sustainability Report</i> , sedangkan likuiditas, <i>leverage</i> , aktivitas, <i>Governance Committee</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Sustainability Report</i>
6	2012	Aboagye-Otchere et al	Praktik pengungkapan penuh, komposisi dewan, komposisi komite audit, kompetensi komite audit, ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, <i>leverage</i>	Ada pengaruh positif antara praktik pengungkapan terhadap komposisi dewan, independensi komite audit, struktur kepemilikan perusahaan dan <i>leverage</i> . Tidak ada pengaruh antara praktik pengungkapan perusahaan dengan ukuran perusahaan dan kompetensi komite audit.
7	2013	Indah	Y= Pengungkapan <i>Sustainability</i> X= <i>Corporate Governance</i>	Variabel dewan direksi, <i>governance committee</i> ,

			(Dewan Komisaris, Komite Audit, Dewan Direksi, <i>Governance Committee</i> , Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , Aktivitas perusahaan, Ukuran perusahaan)	profitabilitas dan ukuran perusahaan berperan positif terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> . Sedangkan dewan komisaris, komite audit, likuiditas, <i>leverage</i> dan aktivitas perusahaan tidak memiliki peran dalam pengungkapan <i>sustainability report</i> .
8	2013	Gisbert dan Navallas	Y = Pengungkapan sukarela X = Karakteristik <i>Corporate Governance</i> (proporsi direktur independen pada dewan, ukuran dewan, Dualitas CEO, konsentrasi kepemilikan)	Ada pengaruh positif antara proporsi direktur independen pada dewan, ukuran dewan, terhadap pengungkapan sukarela; sedangkan Dualitas CEO dan konsentrasi kepemilikan tidak berhubungan signifikan terhadap praktik pengungkapan sukarela.
9	2014	Othman, dkk	Y = pengungkapan sukarela X = independensi komite audit, kompetensi komite audit, frekuensi rapat komite audit, ukuran komite audit, tenur komite audit, beberapa direktur pada komite audit	Tidak ada pengaruh antara komite audit, kompetensi komite audit, frekuensi rapat komite audit, ukuran komite audit, dengan pengungkapan sukarela; sedangkan tenur komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela

2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk memahami hubungan antara *corporate governance* dengan praktik pengungkapan perusahaan, kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran



Penelitian ini akan menguji pengaruh *corporate governance* terhadap praktik pengungkapan perusahaan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). Praktik pengungkapan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini dibedakan menjadi 3 tipe pengungkapan yang diadopsi dari penelitian Aboagye-Otchere et al., (2012) yaitu pengungkapan investor, pengungkapan transparansi dan keuangan, dan pengungkapan *corporate governance*. *Corporate governance* dibagi menjadi empat karakteristik yaitu proporsi dewan komisaris independen,

independensi komite audit, kompetensi komite audit dan struktur kepemilikan perusahaan. Karakteristik perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari ukuran perusahaan dan *leverage*.

2.3 Hipotesis

2.3.1 Proporsi Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Berdasarkan teori keagenan dewan komisaris diperlukan untuk memantau dan kontrol terhadap tindakan dewan direksi. Dewan komisaris independen dipandang sebagai mekanisme *check and balance* untuk meningkatkan efektifitas dewan (Haniffa dan Cooke, 2002). Jumlah informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan dan waktu penerbitannya dipengaruhi oleh dewan komisaris (Aboagye-Otchere et al.,2012). Dewan komisaris independen apabila telah memenuhi tanggung jawab akuntabilitas dan transparansinya kepada *stakeholders* maka mereka akan mengungkapkan semua informasi secara relevan dan tepat waktu (Aboagye-Otchere et al.,2012). Dewan komisaris independen tidak diragukan dalam hal keahlian dan independensinya, mereka lebih fokus pada melaksanakan fungsi pemantauan dan peran penasehat daripada peran pengambilan keputusan. Dewan komisaris independen akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan (Haniffa dan Cooke, 2002). Apabila jumlah Komisaris Independen semakin besar atau dominan, hal ini dapat memberikan kekuatan kepada Dewan Komisaris untuk menekan Manajemen meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan (Haniffa dan Cooke, 2002).

Apabila dewan direksi telah mengungkapkan informasi lebih luas kepada publik maka asimetri informasi antara investor dengan manajemen akan berkurang sehingga memperkecil masalah keagenan pada perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 . Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap tingkat praktik pengungkapan perusahaan .

2.3.2 Independensi Komite Audit

Berdasarkan teori keagenan, asimetri informasi yang terjadi antara manajemen dan investor akan menimbulkan *moral hazard* yang akan dilakukan manajemen kepada investor (Hendriksen dan Van Breda, 2001). *Moral hazard* dapat terjadi ketika manajemen bertindak demi keuntungannya sendiri, namun hal tersebut akan merugikan investor. Komite Audit adalah mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi, melindungi investor, dan memelihara kualitas pengungkapan informasi keuangan. Sesuai dengan keputusan ketua BAPEPAM No: kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dewan komisaris.

Cety dan Suhardjanto (2010) mengungkapkan bahwa anggota komite audit yang independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, termasuk dalam pengungkapan informasi. Semakin independen komite audit diharapkan dapat meningkatkan praktik pengungkapan perusahaan. Komite audit yang independen akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dewan dalam memantau proses pelaporan keuangan perusahaan (Aboagye-Otchere et al.,2012).

Independensi komite audit yang semakin besar akan menghasilkan pengawasan yang semakin baik dan kualitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan semakin meningkat. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 . Independensi Komite Audit berpengaruh positif terhadap tingkat praktik pengungkapan perusahaan.

2.3.3 Kompetensi Komite Audit

Kehadiran ahli keuangan dalam komposisi komite audit akan membantu komite audit dalam menganalisis kebijakan akuntansi dan laporan keuangan secara kritis, mengidentifikasi potensi masalah, dan pemecahannya (Aboagye-Otchere et al, 2012). Persons (2009) mengatakan bahwa anggota komite audit dengan keahlian keuangan atau akuntansi lebih mungkin untuk mendeteksi salah saji keuangan atau transaksi bisnis karena mereka harus mematuhi kode etik profesional untuk mempertahankan reputasi mereka. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa komite audit yang memiliki keahlian tersebut harus lebih efektif karena ia akan memantau perusahaan. Mereka juga bisa melaksanakan tugasnya secara etis sehingga manajemen akan terdorong untuk mengungkapkan laporan keuangan dengan baik sebagai bukti akuntabilitasnya terhadap perusahaan.

Aboagye-Otchere et al (2012) menemukan pengaruh positif antara kompetensi komite audit dengan praktik pengungkapan. Komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau keuangan mampu memahami dan

menafsirkan laporan keuangan yang di sediakan oleh manajemen dengan lebih baik. Setiap ketidakpatuhan dalam hal pengungkapan wajib laporan tahunan perusahaan akan dapat dideteksi dengan lebih mudah oleh komite audit. Komite audit yang memiliki kemampuan di bidang akuntansi/keuangan akan meningkatkan keterbukaan perusahaan dalam mengungkapkan laporan tahunannya. Hal ini akan mengurangi masalah keagenan karena investor akan dapat lebih mengawasi kinerja dan pertanggungjawaban manajemen melalui pengungkapan luas laporan keuangan perusahaan. Dari uraian di atas, hipotesis dari penelitian ini adalah :

H3. Keberadaan ahli akuntansi/keuangan pada Komite Audit berpengaruh positif terhadap tingkat praktik pengungkapan perusahaan.

2.3.4 Struktur Kepemilikan Perusahaan

Struktur kepemilikan perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan dari suatu perusahaan. Praktik pengungkapan menyediakan manajemen kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka bertindak demi kepentingan terbaik dari pemilik (Rouf dan Harun, 2011).

Pemegang saham yang memiliki saham lebih dari 5% dari keseluruhan saham perusahaan memiliki dominasi dalam pengambilan keputusan bisnis perusahaan. Semakin tinggi prosentase pemegang saham yang memiliki saham lebih dari 5% dari keseluruhan saham perusahaan maka kepemilikan perusahaan tersebut semakin terkonsentrasi. Perusahaan dengan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi tidak perlu secara luas memberikan informasi terkait perusahaan

sebab pemegang saham utama dapat lebih mudah mengakses informasi dan merekalah yang lebih mendominasi keputusan bisnis perusahaan (Elzahar and Hussainey, 2012).

Konflik agensi yang potensial dapat terjadi ketika kepemilikan saham tersebar pada banyak pihak (Aboagye-Otchere et al, 2012). Perusahaan dengan prosentase struktur kepemilikan yang lebih dari 5% rendah maka struktur kepemilikan perusahaan tersebut menyebar. Jika saham dimiliki oleh banyak pihak yang tidak terlalu mendominasi dalam pengambilan keputusan perusahaan maka akan banyak informasi perusahaan yang belum mereka ketahui. Hal tersebut akan membuat manajemen mengungkapkan informasi yang lebih luas demi memenuhi kebutuhan informasi investor tersebut sehingga mengurangi asimetri informasi yang terjadi pada investor. Dari penjelasan tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah :

H4. Struktur kepemilikan perusahaan berpengaruh negatif terhadap tingkat praktik pengungkapan perusahaan.

2.3.5 Ukuran Perusahaan

Semakin besar perusahaan maka akan semakin menarik perhatian *stakeholder* dan para investor. Perusahaan besar akan semakin berkepentingan dalam melakukan praktik pengungkapan perusahaan yang lebih luas. Pengungkapan yang luas ini dimaksudkan untuk, antara lain: mendidik dan menginformasikan para *stakeholder* tentang tujuan atau maksud organisasi untuk meningkatkan kinerjanya, mengubah persepsi organisasi tanpa mengubah kinerja

aktual organisasi, mengalihkan atau memanipulasi perhatian dari isu-isu penting ke isu-isu lain yang berhubungan, atau mengubah ekspektasi eksternal tentang kinerja organisasi (Suryono dan Prastiwi, 2011). Perusahaan besar yang melaksanakan praktik pengungkapan yang luas akan memperoleh keuntungan yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkannya untuk melaksanakan praktik pengungkapan tersebut. Berdasarkan teori keagenan, perusahaan hendaknya mengungkapkan informasi secara lebih luas kepada investor dan *stakeholder* yang lain untuk mengurangi asimetri informasi. Perusahaan kecil akan merasa terbebani dengan pengungkapan yang luas karena biaya yang mereka keluarkan tidak sebanding dengan manfaat yang mereka peroleh. Perusahaan kecil justru merasa bahwa pengungkapan informasi yang luas bisa membahayakan posisi kompetitif mereka (Aboagye-Otchere et al.,2012). Perusahaan kecil umumnya berada pada situasi persaingan yang ketat dengan perusahaan yang lain (Haryanto dan Yunita, 2005). Mengungkapkan terlalu banyak tentang jati dirinya kepada pihak eksternal dapat membahayakan posisinya dalam persaingan, sehingga perusahaan kecil cenderung untuk tidak melakukan pengungkapan selengkap perusahaan besar (Suripto dan Baridwan, 1999). Berdasar argumen-argumen di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat praktik pengungkapan perusahaan.

2.3.6 Leverage

Leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya baik jangka pendek maupun jangka panjang jika suatu perusahaan

dilikuidasi (Hadiningsih, 2007). Berdasarkan teori keagenan, perusahaan seharusnya mengungkapkan informasi kepada investor, kreditor, dan *stakeholder* yang lain guna mengurangi masalah keagenan yang terjadi pada perusahaan. Perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi akan termotivasi untuk secara sukarela mengungkapkan informasi yang luas untuk mengakomodir kepentingan kreditor (Aboagye-Otchere et al., 2012). Informasi ini digunakan untuk menilai pertumbuhan suatu perusahaan di masa depan dan meningkatkan peluang perusahaan untuk mendapatkan dana dari lembaga keuangan (Barako et al., 2006). Menurut Schipper (1981) dalam Fitriany (2001), tambahan informasi juga diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditor. Dari argumen tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6. *Leverage* dari suatu perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat praktik pengungkapan perusahaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dari penelitian ini adalah praktik pengungkapan perusahaan. Menurut prinsip OECD (1999), kerangka *corporate governance* harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat itu berdasarkan pada situasi keuangan, kepemilikan dan tata kelola perusahaan. Berdasarkan prinsip OECD tersebut maka kategori pengungkapan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengungkapan keuangan, pengungkapan kepemilikan perusahaan dan pengungkapan tata kelola perusahaan secara wajib maupun sukarela.

Indikator pengungkapan wajib dan sukarela dituangkan dalam 95 item pertanyaan yang di kelompokkan dalam tiga kategori pengungkapan. Tiga kategori tersebut adalah pengungkapan struktur kepemilikan dan investor (20 item pertanyaan), pengungkapan keuangan (41 item pertanyaan) dan pengungkapan *corporate governance* (34 item pertanyaan). Item- item pertanyaan ini diambil dari pengungkapan yang digunakan dalam penelitian Aboagye-Otchere et al., (2012). Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut (1 untuk jawaban “ya” dan 0 untuk jawaban “tidak”) yang nantinya akan digunakan untuk menghitung *score* pengungkapan. Sumber jawaban dari item-item pertanyaan itu dapat diperoleh

dari mengidentifikasi *annual report* perusahaan sampel. Item pertanyaan praktik pengungkapan penuh perusahaan dapat di lihat pada lampiran B.

Sesuai dengan penelitian Aboagye-Otchere et al (2012), skor pengungkapan perusahaan dapat diperoleh dari :

$$DISCL = \sum_j \sum_k \frac{S_{jk}}{TOTS}$$

Penjelasan untuk j adalah kategori pengungkapan j=1,2,3 (1= pengungkapan investor; 2= pengungkapan keuangan; 3= pengungkapan *corporate governance*), k adalah item pengungkapan k=1-95. Sjk adalah jumlah item informasi pengungkapan (jumlah jawaban "ya") pada perusahaan di masing-masing kategori, TOTS adalah total maksimum jawaban "ya" untuk masing-masing perusahaan.

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen pada penelitian ini terdiri dari dua kelompok yaitu karakteristik *corporate governance* dan karakteristik perusahaan. Karakteristik *corporate governance* terdiri dari empat variabel, yaitu proporsi dewan komisaris independen, independensi komite audit, kompetensi komite audit dan struktur kepemilikan perusahaan. Karakteristik perusahaan terdiri dari ukuran perusahaan dan *leverage*.

3.1.2.1 Proporsi Dewan Komisaris Independen

Proporsi dewan komisaris independen adalah prosentase komisaris independen yang ada pada dewan komisaris. Variabel ini dihitung dengan cara

total anggota dewan komisaris independen dibagi dengan jumlah anggota dewan komisaris yang ada pada perusahaan tersebut.

3.1.2.2 Independensi Komite Audit

Independensi komite audit dapat dihitung dengan cara membagi antara jumlah dewan komisaris independen yang ada pada komite audit dengan jumlah anggota komite audit di perusahaan tersebut.

3.1.2.3 Kompetensi Komite Audit

Kompetensi komite audit adalah ada atau tidaknya ahli akuntansi/keuangan dalam komite audit. Kompetensi komite audit ini diukur dengan variable dummy yaitu 1 untuk perusahaan yang terdapat ahli akuntansi/keuangan di komite auditnya dan 0 untuk sebaliknya.

3.1.2.4 Struktur Kepemilikan Perusahaan

Cara pengukuran variable ini adalah dengan mencari proporsi saham yang dimiliki oleh pemegang saham substansial yang lebih dari 5% dari total saham. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data proporsi saham yang tercantum dalam laporan tahunan perusahaan.

3.1.2.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari nilai total asset akhir tahun yang dapat dilihat pada *annual report* dan laporan keuangan perusahaan sampel.

3.1.2.6 Leverage

Leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya baik jangka pendek maupun jangka panjang jika suatu perusahaan dilikuidasi (Hadiningsih dalam Suryono, 2011), dapat dihitung dengan rumus:

$$DER = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Peneliti menggunakan DER yang tercantum dalam laporan tahunan perusahaan.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, sampel yang diambil merupakan sampel yang dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria-kriteria yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013.
2. Perusahaan mempublikasikan laporan tahunan secara berturut-turut dan lengkap dari tahun 2011-2013.
3. Laporan keuangan perusahaan menggunakan mata uang Indonesia.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data skunder berupa laporan keuangan dan *annual report* dari perusahaan yang *listing* di BEI tahun 2011-2013 serta data-data pustaka yang lain yang dapat menunjang terlaksananya penelitian ini. Data *annual report* diperoleh dari website BEI (www.idx.co.id).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan dokumentasi dari sumber yang digunakan, yaitu laporan keuangan dan *annual report* perusahaan sampel.

3.5 Metode Analisis

Dalam penelitian ini alat statistik yang digunakan adalah *Multiple Regression Analysis* dengan bantuan software SPSS. Model Regresi yang digunakan untuk menguji pengaruh antara tata kelola perusahaan dan karakteristik perusahaan dengan praktik pengungkapan perusahaan mengikuti penelitian yang dilakukan oleh Aboagye-Otchere et al (2012) adalah sebagai berikut :

$$\text{DISCLit} = \alpha + \beta_1\text{BDIN} + \beta_2\text{ACIND} + \beta_3\text{ACEXPT} + \beta_4\text{OWNSTURE} + \beta_5\text{TA} + \beta_6\text{LEVRG} + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

DISCLit : Praktik pengungkapan perusahaan i pada tahun t.

α : Konstanta

BDIN : Proporsi Dewan Komisaris Independen

ACIND : Independensi Komite Audit

ACEXPT : Kompetensi Komite Audit

OWNSTURE : Struktur kepemilikan perusahaan

TA : Ukuran perusahaan (Total Aset)

LEVRG : *Leverage*

ϵ_{it} : Standar error

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu data melalui nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtois* dan *skewness* (Ghozali, 2011).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan agar model regresi yang digunakan menjadi model yang BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Model tersebut dapat digunakan untuk keperluan estimasi serta mengurangi bias data. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel *residual* memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Uji t dan F diasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal.

Salah satu cara untuk melihat normalitas *residual* adalah melalui grafik histogram, dengan membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendeteksi distribusi normal. Metode lain yang lebih handal adalah dengan melihat *normal probability plot*. Distribusi normal akan membentuk garis diagonal. Dasar pengambilan keputusan untuk menganalisis normalitas *residual* melalui metode *normal probability plot* adalah sebagai berikut:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.5.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Multikolonieritas terjadi jika ada hubungan linear yang sempurna atau hampir sempurna antara beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik tidak menunjukkan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi, antara lain dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Batas nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* ≤ 0.10 atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$ (Ghozali, 2011).

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau

tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antar SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di-*studentized*. Dasar analisisnya adalah:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) akan mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik penyebaran di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka terjadi heteroskedastisitas.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara *residual* (kesalahan pengganggu) pada periode sekarang dengan periode sebelumnya. Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi. Salah satu cara untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah menggunakan uji Durbin-Watson (*DW test*). Nilai DW yang dihasilkan dari output SPSS, dibandingkan dengan nilai signifikansi penelitian, jumlah sampel, dan jumlah variabel independen. Kesimpulan yang menunjukkan tidak adanya nilai autokorelasi positif maupun negatif apabila nilai DW lebih besar dari batas atas (du) dan kurang dari jumlah variabel independen dikurangi du (Ghozali, 2011).

3.5.3 Regresi Berganda (*Multiple Regression*)

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi untuk melihat ketergantungan antara variabel dependen dengan variabel independen, yang bertujuan untuk mengestimasi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen didasarkan pada variabel independennya (Gujarati, 2003 dalam Ghozali, 2011). Untuk mengukur nilai aktual, secara statistik dapat diukur melalui tiga cara, yaitu koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. H_0 akan ditolak apabila uji statistiknya berada dalam daerah kritis.

3.5.3.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependennya amat terbatas (Ghozali, 2011). Semakin nilai R^2 mendekati 1, maka variabel independen hampir memberikan semua informasi untuk memprediksi variabel dependen. R^2 memiliki kelemahan yaitu bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Hal ini dapat diatasi dengan melihat nilai adjusted R^2 untuk menganalisis mana model regresi terbaik. Nilai adjusted R^2 ini dapat naik atau turun apabila satu variabel ditambahkan dalam model.

3.5.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F bertujuan untuk menguji apakah semua variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

3.5.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji statistik t menunjukkan bagaimana pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Bila nilai t hitung lebih besar dibandingkan dengan t tabel, maka H_a diterima yang berarti bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara individual.